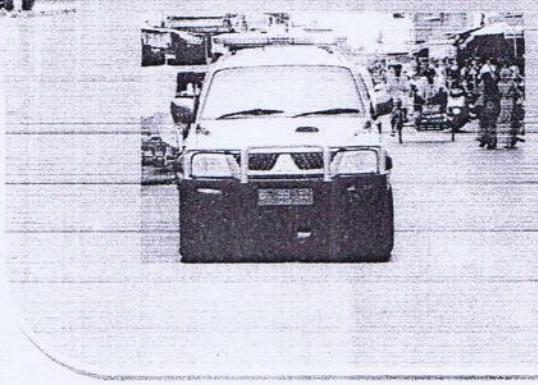
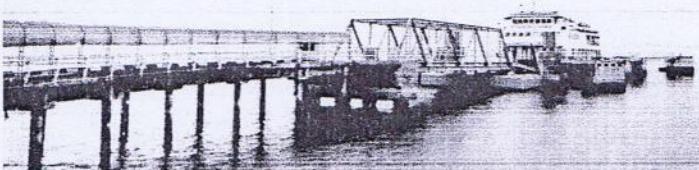




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

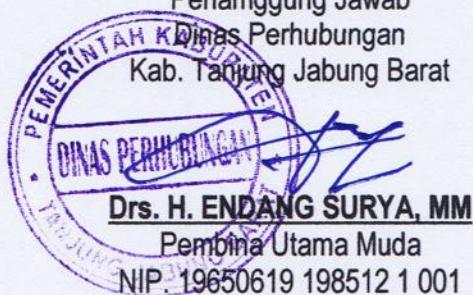
Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renstra ini disusun sebagai upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam pencapaian indikator kinerja. Selain itu untuk mengevaluasi pelaksanaan Renstra selama kurun waktu 2016-2021 dan memberikan penajaman dalam pelaksanaan Renstra khususnya tahun 2016 dan 2021. Hal dimaksud dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, baik eksternal maupun kondisi internal.

Sebagai dokumen perencanaan bidang transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2016 dan 2021.

Kuala Tungkal, Oktober 2017

Penanggung Jawab
Dinas Perhubungan
Kab. Tanjung Jabung Barat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
2.2 SUMBER DAYA SKPD	9
2.3 KINERJA PELAYANAN	11
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD	12
BAB III. STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	13
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)	13
3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	15

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	14
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	15
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	15
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	16
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN	17
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
19	
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
23	
BAB VII. PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	9
2.2.2 ASSET PENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN DAN OPERASIONAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	10
3.1 TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH	16
4.1 TUJUAN DALAM SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SERTA TARGET KINERJA SASARAN DALAM LIMA TAHUN MENDATANG	18
5.1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	19
6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	23

DAFTAR GAMBAR

2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN
KOMUNIKASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Perhubungan.

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiajan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam penyusunannya

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun melalui dasar :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- i. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk secara konsekuensi dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

- 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
- 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- 3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- 4. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu menetapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang OPD

BAB III STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati (PM)
- 3.3 telaahan Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
- 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

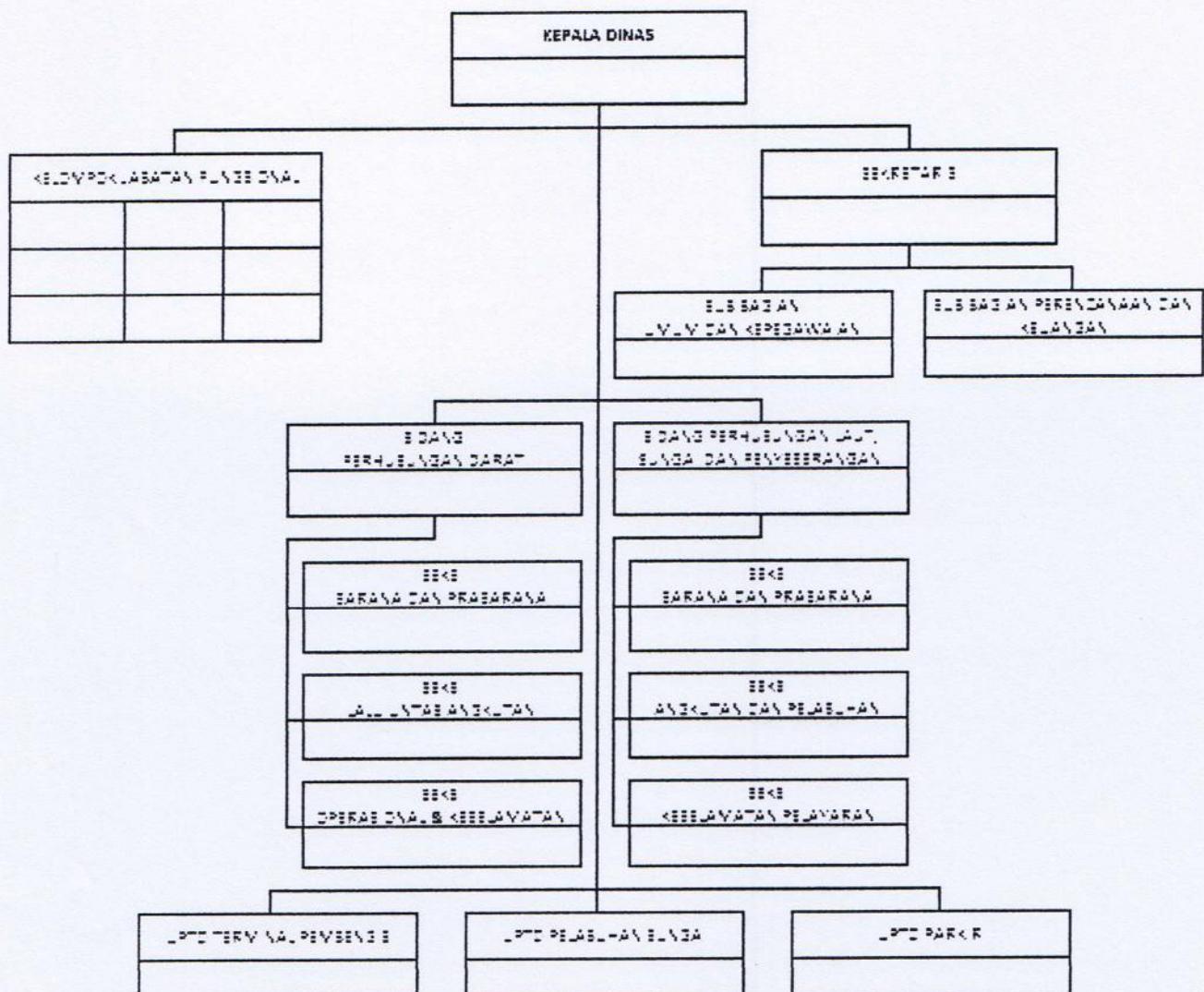
- a. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dilingkungan dinas;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit pelayanan teknis dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perhubungan Darat; yang membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
 - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Seksi Operasi dan Keselamatan
4. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan; yang membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan
 - Seksi Angkutan dan Kepelabuhan
 - Seksi Keselamatan Pelayaran

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2 SUMBER DAYA SKPD

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/perlengkapan/ asset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana (S-2)	2
2	Sarjana (S-1)	10
3	Diploma (D-3)	2
4	Diploma (D-2)	1
5	SLTA	19
6	SLTP	1
7	SD	1
8	Paket C	2
J U M L A H		37

b. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SPAMEN (PIM. II)	
2	SPAMA (PIM. III)	1
3	ADUM/ ADUMLA (PIM. IV)	1
4	ADUM/ ADUMLA(PIM. V)	1
J U M L A H		3

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV	1
2	III	16
3	II	19
4	I	1
J U M L A H		37

d. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II B (Kepala Dinas)	1
2	Eselon III A (Sekretaris)	1
3	Eselon III B (Kepala Bidang)	2
4	Eselon IV A (Kasubbag/ Kassi)	7
5	Eselon IV B (Kasubbag UPTD)	3
6	Staf (Termasuk CPNS)	23
J U M L A H		37

2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.

Adapun asset yang mendukung kegiatan pelayanan dan operasional pada yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Asset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana a. Gedung Kantor Dishub b. Terminal Kota c. Bongkar Muat Barang d. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor f. Pelabuhan Sungai Kuala Tungkal - Pos Dermaga Tangga Raja Ulu - Pos Dermaga Ampera - Pos Dermaga Pasar Kuatik	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	
2.	Fasilitas Keselamatan Transportasi a. Rambu Darat b. Rambu Type F c. Rambu Mini	178 unit 14 unit 13 unit	

	d. RPJJ (rambu petunjuk jalan darat) e. Pagar Temporer f. Warning Light h. Guadral i. Deliniator Rambu Sungai	9 unit 40 unit 12 unit 3 paket 280 buah 7 buah	
--	--	---	--

Sumber : Data Aset Dinas Perhubungan Posisi September Tahun 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten tanjung Jabung Barat dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelayanan transportasi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi maka infrastruktur sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Adapun prasarana yang ada di Dinas Perhubungan antara lain :

Bidang Perhubungan Darat

- a. Terminal Kota
- b. UPTD Parkir
- c. Hanggar Bongkar Muat
- d. Gedung pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

- a. UPTD Pelabuhan Sungai
- b. UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal
- c. Pos Pengawasan
 - Dermaga Tangga Raja Ulu
 - Dermaga Ampera
 - Dermaga Pasar Kuatik

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG SKPD

2.4.1 Urusan Perhubungan

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

1. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
2. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
3. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian angkutan barang.
4. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.
5. Sarana dan prasarana yang belum lengkap.

b. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain:

1. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.
3. Konektivitas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 INDETIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dewasa ini fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya dijaman modern ini sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya, dan itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan ekonomi, pengetahuan dan informasi.

Adapun permasalahan yang dihadapi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dibidang perhubungan.
2. Belum memadainya cakupan infrastruktur transportasi.
3. Belum optimalnya pembinaan angkutan, keselamatan lalu lintas.
4. Belum optimalnya distribusi informasi.
5. Belum optimalnya pengendalian.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI (PM)

Visi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas"

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung dengan Misi, adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan umum (*publik service*) meliputi debirokratisasi, transparansi pelaksanaan pemerintah dalam rangka *good government* dan *clean government*, peningkatan infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan, irigasi, listrik dan jaringan air bersih, serta peningkatan penanganan permasalahan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat melalui pemerataan dan perluasan kualitas pendidikan formal dan informal. Termasuk pendidikan moral, dai desa, imam masjid, kaum masjid dan lainnya, peningkatan derajat

kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat melalui mendorong tumbuhnya industri pengolahan dalam rangka menambah *value added*, peningkatan pelabuhan perikanan Kuala Tungkal menjadi pelabuhan nusantara, penyediaan kapal nelayan berukuran besar untuk dapat mengurangi zona ekonomi eksklusif, penyediaan bibit, pupuk dan teknologi pertanian serta peningkatan daya beli masyarakat (perekonomian).
4. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama suku dan adat istiadat serta mewujudkan supremasi hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pers lokal LSM.

3.3 TELAAHAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah "Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah." Sedangkan misi :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
3. Peningkatan professionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah : "Terwujudnya Jambi Tuntas 2021 melalui penyelenggaraan sistem transportasi yang andal dan memiliki daya saing dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dalam rangka menunjang perekonomian daerah."

Sedangkan misi adalah :

1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Transportasi yang memiliki daya saing dan terpadu didukung oleh sistem perencanaan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pengembangan transportasi massal dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Efisien dan Efektif dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, tertib, daman, lancar, nyaman, selamat dan terjangkau.
4. Memperluas jaringan pelayanan dan penyediaan akses Transportasi untuk mendukung Distribusi Barang/Jasa melalui pengembangan transportasi multi moda.
5. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kelembagaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, berkualitas, profesional dan menguasai teknologi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033 yang sudah ditetapkan akan mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana pembangunan proyek diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Belum siapnya infrastruktur pendukung sektor perhubungan dan komunikasi	Banyaknya stakeholder dengan berbagai kepentingan	Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang, rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi.
2. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.
3. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu dibangun agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
4. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disertai dengan peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan dibidang transportasi.
5. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI (PM)

4.1.1 Visi

Visi OPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sejalan dengan Visi Bupati Tanjung Jabung Barat, Visi Dinas Perhubungan adalah :

“Terwujudnya transportasi antar MODA yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat”.

4.1.2 Misi

Misi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian misi sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/ produk organisasi selalu mengarah kepada pencapaian Visi.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang berkualitas.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang terintegritas.
3. Meningkatkan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Perhubungan yang berkompetensi dan profesional

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal.

2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi.
3. Memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa transportasi

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal	Pembangunan Infrastruktur transportasi	Capaian Infrastruktur transportasi	35%	35%	35,02%	35,10%	36%	38%
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya layanan pengguna transportasi	Capaian layanan pengguna transportasi	40%	40%	45%	47%	50%	50%
Memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa transportasi	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan.	Capaian layanan pengguna transportasi	40%	40%	45%	47%	50%	50%

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

4.3.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan Transportasi
2. Mengatasi operasional pengendalian dan pengamanan lalu lintas

3. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, angkutan jalan, laut, sungai dan Penyeberangan
4. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia oleh aparatur perhubungan.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi LLAJSDP.
2. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan.
3. Peningkatan pengendalian, keselamatan, pengamanan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan penyeberangan.
4. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
6. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2016) sampai dengan Tahun Kelima (2021), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Areal						Target Kinerja Program dan Kategori Pindah						Unit kerja SKPD Pangang Jawab	Lokasi	Kondisi Akhir	
							2016	2017	Target	Rp.(A)	Target	Rp.(A)	Target	Rp.(A)	Target	Rp.(A)	Target	Rp.(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			1.02.09.01.01	Pembangunan	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor	unit	-	-	642.113.220	-	704.464.440	-	864.050.000	-	895.050.000	-	924.400.000					
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelaksanaan perekaman	lembar	0	100	4.500.000	1000	4.500.000	1000	4.500.000	1200	5.400.000	1200	5.400.000					
			02	Penyediaan jasa komunikasi surtree daya listrik dan air bersama daya limiter	pelayanan administrasi perkantoran	bulan	0	12	240.400.000	12	268.000.000	12	300.000.000	12	335.000.000	12	340.000.000					
			05	Penyediaan jasa limiter baterai multi dewah	operasional kognitif	%	0	100	53.000.000	100	37.200.000	100	46.930.000	100	55.000.000	100	58.000.000	100	60.000.000			
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya fungsi adm keuangan	%	0	100	96.020.000	100	105.820.000	100	118.940.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000			
			08	Penyediaan jasa kesehatan	pelayanan administrasi perkantoran meningkat	%	0	100	6.892.150	100	8.027.478	100	12.347.240	100	12.500.000	100	13.000.000	100	13.500.000			
			10	Penyediaan jasa tukis kantor	pelayanan administrasi perkantoran meningkat	%	0	100	44.134.170	100	50.545.200	100	49.845.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000			
			11	Penyebarluasan ceklik dan pengawalan	pelayanan administrasi perkantoran meningkat	%	0	100	51.328.000	100	34.600.000	100	27.550.000	100	33.150.000	100	34.150.000	100	35.000.000			
			13	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	pelayanan administrasi perkantoran meningkat	%	0	100	3.737.300	100	4.610.100	100	4.611.200	100	5.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000			
			15	Penyediaan bahan bahan berasaskan penundaan dan peningkatan mutu	pelayanan administrasi perkantoran meningkat	%	0	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000			
			17	Penyediaan makanan minuman	pelayanan administrasi perkantoran meningkat	orang	0	60	4.200.000	60	4.200.000	60	4.200.000	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.500.000			
			18	Raport-acak konservasi dan konflikasi ke luar daerah	pelayanan administrasi perkantoran meningkat	pasok	0	1	149.000.000	1	180.184.860	1	221.540.000	1	240.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000			
			1.02.09.01.02	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana ABABAT	Meningkatnya kinerja pelayanan kantor	unit	-	45	515.280.000	84	656.450.000	97	610.130.000	102	1.127.560.000	106	1.150.260.000	90	1.211.250.000			
			02	Pengelolaan kendaran dinas/operasional	Konvenienensi kerja	unit	0	-	-	-	1	30.000.000	1	20.000.000	0	-	0	-	-			
			02	Pengelolaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya kerjanya keramahan kerja	unit	0	6	26.000.000	13	16.200.000	0	-	20	103.560.000	20	105.360.000	20	106.250.000			
			02	Pengelolaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya kerjanya keramahan kerja	unit	0	-	-	4	81.200.000	0	-	6	64.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000			
			22	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Sarana Transportasi terpilihkan	unit	0	30	304.690.000	30	306.980.000	30	472.180.000	30	500.000.000	30	550.000.000	30	600.000.000			
			22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	gedung kantor dekam	unit	0	1	62.000.000	1	52.000.000	30	28.460.000	25	360.000.000	15	360.000.000	20	360.000.000			
			26	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	kondisi kantor	unit	0	26	42.800.000	36	58.500.000	36	79.550.000	25	60.000.000	30	60.000.000	20	100.000.000			
			1.02.09.01.03	Pengembangan Disiplin	Meningkatnya kinerja pelajaran kerja	orang	132	51.200.000	132	40.720.000	132	89.375.000	132	150.000.000	132	122.000.000	132	135.000.000				
			02	Pengembangan dan difas das pengelolaan	Peningkatan dasar kinerja	orang	132	51.200.000	132	40.720.000	132	89.375.000	132	150.000.000	132	122.000.000	132	135.000.000				
			1.02.09.01.05	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Awastur	Meningkatnya kinerja pelajaran kerja	orang	7	0	-	0	-	5	-	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000			
			02	Pengembangan dan pemeliharaan	Peningkatan kinerja pelajaran kerja	orang	7	0	-	0	-	5	-	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000			
			1.02.09.01.06	Peningkatan	Meningkatnya kinerja pelajaran kerja	orang	100	112.800.000	100	108.900.000	100	117.610.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000				
			06	Pengembangan dan pemeliharaan	Harga dan kisaran realisasi kerja	orang	100	112.800.000	100	108.900.000	100	117.610.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000				

Tujuan	Satuan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan pada Tahun Awal Penerapan	Data Capaian						Target Kinerja Program dan Ketercapaian Pendanaan						
							2016	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17					
				22	Kegiatan penciptaan kesadaran dan keinginan serta pelaksanaan kewajiban bagi pengguna dan pembuat lalu lintas	Unit	2	-	2	197.300.000	2	262.215.000	2	260.000.000	2	265.000.000	2	270.000.000	
					Program Pengendalian Jam Pegangan Lalu Lintas	Unit	22 unit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
					01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Unit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
					- Rambu	Unit	*	*	30	*	30	*	30	*	30	*	30	*	
					- Guardrail	Unit	*	*	150	*	150	*	140	*	140	*	150	*	
					- RRPJ	Unit	*	*	3	*	3	*	7	*	10	*	12	*	
					03 Operasional pengawalan terikatannya terhadap pengelolaan dan operasional pengawalan penggunaan lalu lintas	Unit	*	*	12	664.000.000	12	708.360.000	12	760.000.000	12	770.000.000	12	780.000.000	
					Program Peningkatan jumlah kendaraan yang lulus uji	Unit	1044	1154	228.907.000	943	194.000.000	1300	8.600.000	1350	110.000.000	1400	120.000.000	1450	140.000.000
					02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Unit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
					- pengujian kendaraan bermotor	Unit	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
					05 Uji kelakuan pengoperasian kendaraan bermotor	Unit	*	*	228.907.000	66.000.000	66.000.000	8.600.000	110.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	140.000.000	
					- cekat batu uji	Unit	*	*	2000	*	2000	*	2200	*	2200	*	2200	*	
					- cekat plat uji pemung	Unit	*	*	0	*	0	*	2100	*	2100	*	2100	*	
					- cekat stiker sampling	Unit	*	*	2000	*	2000	*	2200	*	2200	*	2200	*	
JUMLAH KESELURUHAN							4.132.405.220		3.822.297.656		4.072.706.340		5.994.610.000		6.238.310.000		6.216.650.000		



Kepala Tingkat
Oktober 2017

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, tersusun dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Capaian Infrastruktur transportasi	35%	35%	35,02%	35,10%	36%	38%	38%	
2	Capaian layanan pengguna transportasi	40%	40%	45%	47%	50%	50%	50%	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE 2017-2021

TUGAS :
FUNGSI :

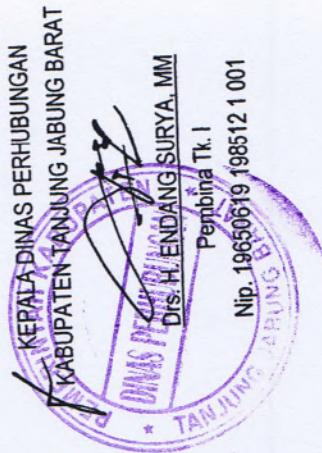
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan

1. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja dinas;
2. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis operasional dilengkungkan dinas;
3. Menyelenggarakan urusan penerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan perhubungan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit pelayanan teknis dinas;
5. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
Peningkatan kualitas halte dan dermaga sungai untuk kelancaran transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peningkatan kualitas halte sungai sebanyak 13 unit 2. Jumlah peningkatan dermaga sungai 3. Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan 	Dishub	Dishub dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan dan Desa	Untuk pembuatan dokumen perencanaan oleh Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk pembangunan fisik di anggarakan melalui Dana APBN Kementerian Perhubungan RI
Meningkatnya kualitas prasarana transportasi	Jumlah prasarana yang dipelihara dan direhab sebanyak 13 unit	Dishub	Dishub	Khusus untuk Halte Sungai yang telah dibangun Tetap berkoordinasi dengan Bappeda, Kecamatan dan Desa
Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah wilayah pelayanan transportasi pada Pelabuhan Sungai, Pelabuhan RoRo, Terminal dan Parkir 2. Terlaksananya sosialisasi penyuluhan lalu lintas angkutan darat dan angkutan sungai 3. Kegiatan pelayanan transportasi untuk posko ramdhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan 4. Terlaksananya pengawasan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas 	Dishub	Kepolisian, Dinas PU, Asuransi Jasa Raharja, Sat Pol PP, Bagian Hukum Setda Tanjung Jabung Barat, KSOP dan Kecamatan/Desa.	
Peningkatan frekuensi pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah fasilitas keselamatan <ul style="list-style-type: none"> a. Rambu-rambu darat 85 unit 	Dishub	Dishub	Tetap berkoordinasi dengan Badan pengelola Provinsi Transportasi Darat dan Dinas Perhubungan

	b. RPPJ 29 unit 2. Menurunnya pelanggaran ketertiban lalu lintas sebanyak 15 unit	Dishub	Kepolisian, Dinas PU, Asuransi Jasa Raharja, Sat Pol PP, Bagian Hukum Setda Tanjung Jabung Barat	Provinsi Jambi
Peningkatan jumlah kendaraan lulus uji	Jumlah kendaraan wajib uji 1450 unit	Dishub	Dishub	

Kuala Tungkal, September 2017



BAB VII

PENUTUP

Untuk mewujudkan terciptanya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yang mengacu pada indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - Tahun 2021, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2016 - 2021. dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas Perhubungan. dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.